

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Fickar Hadjar, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemiyaan, 2003)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Agus Suntoro, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Anthon F Susanto, *Wajah peradilan kita*. (Bandung; Refika Aditama, 2004)
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Crince Le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenal Ulang*, diterjemahkan oleh Soehadjo, tanpa cetakan, (Semarang: 1981)
- Deny Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Timur 2008)
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010)
- Fakhri Maulidi, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Prespektif Hukum Ketatanegaraan*, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 15, Agustus 2020
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali. 2005)
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Daerah*, Malang: UB Press, 2011
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: cet-1, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar grafika, 2006)
- Jimly Ashiddiqie. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Ke-empat UUD 1945*, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar;14-18 Jul 2003
- Loistra Ginting, “Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan
- Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 1999)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 2008
- R.M.A.B.Kusuma, “Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip “check and balances”
Jurnal konstitusi, Vol. 1 Nomor 2 Desember (2004)
- Sirajun dkk., *Hukum Pelayanan Publik*. (Malang ; Setara press, 2012)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarata: Rajawali Pers, 2006)

- Sui Generis* Dalam Peristilahan Hukum Adalah Ilmu Hukum Merupakan Ilmu Jenis Sendiri Dalam Hal Cara Kerja dan Sistem Ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Sujamto, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai pustaka, 2007) edisi-3, cek-4
- Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission*, (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005)
- Ujang Charda S., “Potensi Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan Kebijakan Publik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, vol.27 No.02.
- Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya* (Bandung: Mizan, 2001)
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

B. PERUNDANG – UNDANGAN

- Pasal 10 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.
- Pasal 12 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.
- Pasal 37 B ayat (1) poin a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.
- Pasal 37 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.
- Pasal 9 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.

Ananda B. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, (Pusat Studi HTN UI 2004)

C. LAIN-LAIN

Auli Rahmat, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Melalui: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11297/AULIA%20RA%20HMAT%2014410518.pdf?sequence=1>, diakses Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 16:45 WIB.

Detik News, Kadek Melda, *Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik Oleh Dewan Pengawas*, Melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5185917/langgar-kode-etik-ketua-kpk-firli-bahuri-dapat-teguran-tertulis-ii>, diakses Tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 10:45 WIB.

Hafiz Maulana Akbar, Universitas Islam Kalimantan, *Analisis Penyadapan, Pengeledahan dan Penyitaan Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Melalui: <http://ejournal.eprints.uniska-bjm.ac.id/3028/>, diakses Tanggal 27 Mei 2021, Pukul 11:15 WIB.

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat> diakses pada tanggal 17 Agustus 2022

Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, (Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Latarbelakang Diberlakukannya Perubahan Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 1, Melalui: www.kpk.go.id & Email: informasi@kpk.go.id, diakses Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 14:15 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Struktur Organisasi*, Melalui: <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, diakses Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 07:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Tentang Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Melalui: <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pimp>, diakses Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 15:15 WIB.

Lihat Pada Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20191021-094736-2809.pdf>,

Lihat Pada Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi....

Lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatanketua dan anggota dewan pengawas kpk pada pasal 4 ayat(2).

Lihat pada preambule alinea ke-empat Undang Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia

Ismail, „*Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002*” , *Jurnal Ilmu Legal Opinion*, Vol .01 No.02, (2013)

Mudzakir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, melalui:<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/...>, diakses Tanggal 5 April 2021, Pukul 09:05 WIB.

Riyo Eka Sahputra, *Pergeseran Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Usai Terbitnya Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019*, Melalui: <https://kumparan.com/riyoekasahputra/pergeseran-tugas-dewas-kpk-usai-terbitnya-putusan-mk-no-70-puu-xvii-2019-1vgWUSoBLrD/full>, diakses Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 07:30 WIB.

Riyo Eka Sahputra, *Pergeseran Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Usai Terbitnya Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Op.Cit.*

Tugas dan fungsi KPK, www.kpk.go.id, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020

Tentang KPK/Sekilas KPK, www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk. Di akses Pada tanggal 20 Juli 2020